

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Pemerintahan

Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk diwilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah“ tersebut memiliki empat unsure yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut C.F Strong (dalam Drs. Inu Kencana Syafie, M.Si, 1960 : 31) Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, legislatif, dan keuangan. Kemudian juga diilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politika) yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Menurut Samuel Edwar Finer (Drs. Inu Kencana Syafie., M., Si 1885 : 32) pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara,

metode serta sistem (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Ndraha (2011:7) Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil.

Menurut Syafiie (2011:8) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Poelje (dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Menurut Labobo (2011:2) ilmu pemerintahan mengkonstruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.

Gaffar (dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Menurut Budiarto (2009 : 21) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu

Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Rasyid (dalam Labolo 2011:19) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Menurut Syafiie (2011:20) pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terh memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat Daerah (UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 dan 3)

Menurut Surbakti (1999:168) istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengeritannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek :

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.

- b. Ditinjau dari aspek structural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.
- c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Kelurahan/Desa.

2. Teori Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003; 75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selain itu menurut Ndraha (dalam Labobo, 2006;25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)
Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil da layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)
Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah dungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yag diperintah akan barang dan jasa yangmereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

Selanjutnya Rsyid (dalam Labobo, 2006 :26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pengaturan
Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi denga segala bentuknya dimaksudnkan sebagai usaha untuk menciptakan

kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

2. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

3. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Fungsi pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri menncukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

3. Teori Kebijakan Pemerintah

Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan oleh berbagai pejabat daerah.

Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah bahwa peraturan pemerintah hanya berupa (*regeling*) atau kombinasi antara peraturan dan penetapan (*beschicking*).

Dalam melaksanakan tugas pelayanan public saat ini menunjukkan perkembangan paradigma baru, hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public, perkembangan tersebut

membawa pengaruh perubahan pada sikap dan perilaku aparat pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan public, pandangan inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Selain daripada itu menurut Syafiie (2005;146) ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit, yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada pada bagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.
- b. Model kelompok, berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.
- c. Model kelembagaan, yaitu model kelembagaan pemerintah.
- d. Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasinya.
- e. Model rasialisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian model ini segala sesuatu dirangcang dengan tepat dan meningkatkan hasil bersihnya.
- f. Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukungan , hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politik.

Menurut pendapat Friedrich (dalam Wibawa 2011:2) kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.

Soebakti (dalam Wibawa 2011:190) bahwa kebijakan Negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat Negara. Jadi, kebijakan public sebagai tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah, dan kebijakan public sebagai keputusan pemerintah yang mencapai tujuan tertentu.

Menurut Boediardjo (2009:20) kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Menurut Heinz Ewlan dan Kenneth Prewitt (dalam Agustino, 2008 ; 6) adalah “keputusan tetap” yang dicirikan oleh konstitusi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan public dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho,2004:1-7)

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004 :31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan :

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Proses dilakukan organisasi atau perorangan yang bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh legislative, eksekutif, yudikatif, administrasi Negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan ntuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Menurut Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh (Abidin,2004:21).

Aderson dalam Wahab (2004:3) merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang actor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoala tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Aderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh actor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.

Abidin (2004:56) tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian criteria. Berikut ini criteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu diantara berbagai kebijakan :

- a. Efektifitas, mengukur suatu alternative sasaran yang dicapai dengan suatu alternative kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
- b. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- c. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.

Masih menurut Abiin (2004:23) kebijakan public biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada strategis. Sebab kebijakan public berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Menurut Koryati (2005:2007) kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

4. Teori Manajemen

George R.Terry, (dalam Danang 2012:2) Manajemen adalah melakukan pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain.

John M. Pfifner, (dalam Danang 2012:2) Manajemen berhubungan dengan pengarahan orang dan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Stoner dan Freeman, (dalam Danang 2012:2) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

5. Tugas dan Fungsi

Menurut pasal 10 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintahan pusat (politik luar negri,

pertahanan, keamanan, hukum, kebijakan moneter, dan agama). Pemerintah dapat menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintahan berdasarkan asas pembantuan. Dengan demikian Gubernur dapat melimpahkan wewenangnya kepada Bupati, dan Bupati dapat Melimpahkan Kepada Camat.

Menurut PP No.19 tahun 2008 Pasal 14 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah atau kabupaten dan kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat, pada Ayat 2 menyebutkan bahwa Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas pokok Camat adalah membantu Bupati dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan. Salah satu tugas umum pemerintahan Kecamatan adalah membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan (PP. No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat 15 disebutkan bahwa pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Menurut Winardi (2003:26) Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

.Winardi (2003:34) tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruanglingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan Thoha (2011:76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Thoha (2011:79) tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Pengertian fungsi menurut kamus lengkap bahasaindonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Adapun menurut Moenir (2010:18) tugas digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau suatu unsure dalam suatu jabatan , suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Moenir (2010:24) fungsi adalah rincian rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

6. Pelaksanaan Tugas

Dari seluruh rangkaian proses manajemen pelaksanaan merupakan fungsi yang paling mendasar. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Menurut Siagian (2006;126) pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi, untuk melaksanakan tugas tersebut perlu ada pembinaan dari atasan kepada bawahan.

Menurut Terry (dalam Syafiie 2006;81) pelaksanaan kerja adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat pula dikatakan bahwa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh pegawai harus mempunyai ukuran pelaksanaan tugas yang jelas sehingga pekerjaan yang dilakukan selalu sesuai dengan penyelesaian yang ditetapkan. Pelaksanaan tugas mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi.

Standar pelaksanaan tugas perlu dirumuskan guna dijadikan tolak ukur didalam menjadikan perbandingan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang telah dipercayakan kepada seseorang. Standar bermaksud dapat pula

dijadikan sebagai ukuran dalam mengadakan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa *actuating* (pelaksanaan) ini merupakan fungsi manajemen yang sangat mendasar setelah adanya manusia dan organisasi, karena jika manusia yang ada didalam organisasi tidak mampu menjalankan roda organisasi maka sama saja seperti sebuah kendaraan yang tidak bisa dijalankan karena tidak adanya kunci kontak kendaraan tertentu.

7. Teori koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, perkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima.

Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Menurut Handoko (2003 : 195) adalah koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan – tujuan dan kegiatan – kegiatan pada satuan – satuan yang terpisah (departement – departement atau bidang – bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Hasibuan (2006 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur – unsur manajemen dan pekerjaan – pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya koordinasi menurut Manullang (2009 : 72) adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian Koordinasi menurut Daryanto dan Abdullah (2013 : 50) adalah proses untuk menyatukan, mengkomunikasikan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Terlihat dari penjelasan diatas koordinasi merupakan suatu usaha untuk mengarahkan anggota organisasi kepada satu tujuan yang telah ditentukan dengan kegiatan berupa komunikasi. Hasibuan (2006 : 86) berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni :

- a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
- b. Agar orang – orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
- c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
- d. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing – masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
- e. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan koordinasi yang baik menurut Hasibuan (2006 : 88) perlu Cara – cara melakukan koordinasi meliputi :

1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan – tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik (informasi).
2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing – masing individu anggota dengan tujuannya sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama (sinkronisasi).
3. Mendorong para anggota, untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran – saran dan lain sebagainya.

4. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran (berpartisipasi).
5. Membina human relations yang baik antara sesama karyawan (human relation).
6. Sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan.

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadi keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi itu diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Khususnya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mana pimpinan sebagai koordinator dengan melihat bagaimana cara untuk melakukan koordinasi yang mana koordinator wajib melakukan pemberian informasi kegiatan dalam rangka usaha pemberdayaan masyarakat, menyingkrokan kegiatan anggota organisasi dalam membuat ide, membina hubungan dengan anggota dan antar anggota organisasi dengan komunikasi yang dilakukan pimpinan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktifitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang diterapkan.

7. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Arti penting dari pemberdayaan masyarakat ialah untuk membuat masyarakat menjadi berdaya, berdaya yang dimaksud adalah upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan serta mandiri dan sejahtera. Mandiri yang dimaksud ialah

masyarakat dituntut untuk mampu memenuhi segala kebutuhannya dengan tidak tergantung dari orang lain.

Subejo dan Narimo (dalam Mardikanto 2013:32) proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial

Mardikanto (2013:40) memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Word Bank (dalam Mardikanto 2013:28) Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Sedangkan menurut Prijono dan Pranaka (1996:105-106) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara,yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan.proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu,yang kemudian meluas ke keluarga,serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik) maupun social (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah.
3. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus di cegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat, melindungi dan membela harus di lihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah

Linton (dalam Seokanto, 2006 : 22) mendefinisikan masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan mengaggap diri mereka sebagai sesuatu kesatuan sosial dengan batas – batas yang dirumuskan dengan jelas.

Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2003 :169) ialah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Dari pengertian diatas dapat dilihat penjelasan

mengenai pemberdayaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan mereka.

Selanjutnya menurut Sedarmayanti (2004 : 116) menegemukakan pemberdayaan adalah pengembangan potensi ekonomi rakyat, hakekat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, sehingga terpelihara tatanan nilai budaya setempat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Hakim, 2010 : 66). Masyarakat yang mampu dikatakan berdaya jika mereka memiliki kekuatan fisik dan mental yang kuat dan terdidik . Bukan itu saja yang menjadi sumber keberdayaan bagi masyarakat, nilai kekeluargaan dan gotong royong juga menjadi poin didalam membentuk keberdayaan bagi masyarakat. Masyarakat yang berdaya akan membentuk keberdayaan di segala aspek kehidupan, hingga pada akhirnya masyarakat akan lebih mandiri. Ini yang menjadi titik akhir dari pemberdayaan masyarakat.

Menurut Soetomo (2011 : 69) pemberdayaan adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya. Selanjutnya menurut Hakim (2010: 66) upaya memberdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), adanya dorongan (*encourage*), adanya kesadaran (*awareness*). Potensi-potensi yang ada harus dikembangkan dengan cara memberikan dorongan untuk membangun daya yang

memiliki masyarakat dan daerah tersebut. Kesadaran akan pentingnya potensi daerah untuk dikembangkan juga menjadi hal yang wajib dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Penguatan yang dilakukan adalah dengan membentuk suatu pola yang mampu memperkuat atau membangun daya yang dimiliki oleh masyarakat.
3. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Melindungi dalam hal ini adalah melindungi masyarakat yang belum mampu berdiri sendiri untuk menciptakan kemandiriannya sendiri. Keberdayaan yang baru disusun oleh masyarakat itu sendiri harus dilindungi dari adanya pihak kuat atau faktor eksternal untuk memasuki masyarakat tersebut, sehingga lambat laun akan menggeser usaha-usaha yang telah disusun oleh masyarakat.

Dengan diadakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka akan dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri, yang sudah bisa mengerti akan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan bisa mewujudkan pembangunan di daerah. Jadi, dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan pemberdayaan masyarakat yang mana tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan mereka.

Arti penting dari pemberdayaan masyarakat ialah untuk membuat masyarakat menjadi berdaya, berdaya yang dimaksud adalah upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan dan mengembangkan diri untuk

mencapai kemajuan serta mandiri dan sejahtera. Mandiri yang dimaksud ialah masyarakat dituntut untuk mampu memenuhi segala kebutuhannya dengan tidak tergantung dari orang lain.

Mas'ood dalam Mardikanto (2013:26) Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Sedangkan Sumodiningrat dalam Mardikanto (2013:26) Keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Masih Sumodiningrat dalam Mardikanto (2013:33-34) Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya yang berupa modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dan lain-lain.

Menurut Mardikanto (2013:28) Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya aktifitas sosialnya dan lain-lain.

Masih Mardikanto (2013:28) Pemberdayaan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marginal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung jawab (accountable) demi perbaikan kehidupannya.

Rappaport (dalam Mardikanto 2013:29) Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komoditas, dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya

Subejo dan Narimo (dalam Mardikanto 2013:32) proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial

Mardikanto (2013:40) memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Widjaja (2011:77) Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawatan bawah, Inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan melalui pertumbuhan motifasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.

Chambers (dalam Mardikanto 2013:49) Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Word Bank (dalam Mardikanto 2013:28) Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Riley (dalam Mardikanto, 2013:289-290) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan. Kedelapan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- b. Kebebasan mobilitas : kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- c. Kemampuan membeli komoditas kecil; kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu): kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d. Kemampuan membeli komoditas besar; kemampuan individu untuk membeli komoditas besar; kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- e. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga; mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri

mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk dternak, memperoleh kredit usaha.

- f. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.
- g. Kesadaran hukum dan politik; mengetahui nama seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- h. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes; seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- i. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki posisi tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Sedangkan menurut Priyono dan Pranaka (1996:105-106) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara,yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik) maupun social (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah.
3. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus di cegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat, melindungi dan membela harus di lihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah

8. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

9. Teori informasi

Teori informasi [inggris;information theory]adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantitas data sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan [error]melalui suatu kanal komunikasi .Entropi informasi [informatin entropy] sering dipakai sebagai alat untuk maksud ini,dan biasanya bit relata yang diperlukan untuk penyimpanan dan pengiriman informasi tersebut.Sebagai contoh,jika keadaan cuaca harian dinyatakan dengan entropi 3 bit,maka kita katakan bahwa cuaca itu mempunyai rata-rata 3 bit tiap harinya.

Aplikasi dari topik dasar dalam teori informasi meliputi kompresi data tanpa cacat [lossless data compressin,pada file ZIP misalnya],kompresi data [lossy data comression, pada file MP3, misalnya],dan pengkodean kanal [channel coding, pada saluran DSL,ADSL dll].Biasanya teori informasi merupakan titik temu dari bidang-bidang matematika,statistika,ilmu komputer,fisika,neurobiologi,dan teknik listrik serta komputer.Implementasi dan teri ini bwedampak langsung dengan misi ruang,dengan penelitian linguistika dan persepsi manusia,dengan jaringan komputer,jaringan internet serta jaringan telepon genggam.

10. Teori sinkronisasi

Menurut Endang Sumiarni [2013;5],sinkronisasi yang dimaksud adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara

vertikal berdasarkan sistematis hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana yang lebih tepat untuk digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu, para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki [2011;99], terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex sauperiori derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi 23 pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah itu harus disisihkan.

8. Teori bertukar pikiran

Diskusi merupakan kegiatan yang wajar dilakukan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Diskusi melibatkan kerampilan berbicara, dalam ragam budaya masyarakat Indonesia bisa terwujud dalam berbagai bentuk, di antara rutinitas kegiatan berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan obrolan bercirikan antara lain; dilakukan tanpa tujuan yang pasti, sebab pada umumnya dilakukan untuk menambah keakraban, memperluas pergaulan, atau bahkan hanya untuk mengisi waktu luang; dapat dilakukan di manapun, dalam situasi bagaimanapun; 3. bisa dilaksanakan kapan pun, dalam batas waktu tak tertentu; dapat dilakukan oleh siapa pun dengan siapa saja, tanpa klasifikasi dan kesamaan arah; dan 5. tidak memerlukan sarana dan fasilitas.

Salah satu jenis dari keterampilan berbicara adalah diskusi. Diskusi merupakan kegiatan bersama yang dilakukan dengan 1. tujuan untuk mencari kebenaran [ilmiah]; dilakukan dalam situasi resmi ditempat yang formal, meski kadang diskusi nonformal bisa dilakukan di tempat tak formal; dilakukan oleh kalangan yang mencari kebenaran atau meningkatkan kualitas kebenaran; dilaksanakan dalam kelola waktu yang terprogram secara profesional; diperlukan sarana dan peralatan sesuai dengan tingkat dan kualitas diskusi.

9. Teori partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "Participation" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan [John M. Echols dan Hasan Shadily, 2000; 419]. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan [I Nyoman Sumaryadi, 2010; 46].

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, [2001; 201-202] dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok menganalisis masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. H.A.R.

Tilaar,[2009;287]mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah[bottom-up] dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah [2001;38]mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 [dua] berdasarkan cara keterlibatannya,yaitu;

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan,membahas pokok permasalahan ,mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D[2011;61-63]menbedakan partisipasi menjadi empat jenis,yaitu pertama,partisipasi dalam pengambilan keputusan.Kedua,partisipasi dalam pelaksanaan.Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan.Keempat,partisipasi dalam evaluasi.

Pertama,partisipasi dalam pengambilan keputusan.Partisipasi ini terutama berkaitan dengan pentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama.Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau

pemikiran,kehadiran dalam rapat,diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua,partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana,kegiatan administrasi,koordinasi dan penjabaran program.Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan,pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga,partisipasi dalam pengambilan manfaat.Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas.Dari segi kualitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.Keempat,partisipasi dalam evaluasi.Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

10. Human reations

Human reations dalam bahasa Indonesia ada yang menerjemahkan menjadi''Hubungan manusia''dan ada pula yang mengalibahasakan menjadi''Hubungan antar manusia''.Baik dalam istilah''hubungan manusia''maupun''dalam pengertian wujud manusia [human Being],melainkan dalam makna proses rohaniah yang tertuju kepada kebahagiaan berdasarkan watak,sifat,perangai,kepribadian,sikap,tingkahlaku,dan aspek kejiwaan yang

terhadap pada diri manusia. Olehnya itu, terjemahan yang paling mendekati makna dan maksud human relation adalah hubungan manusiawi atau hubungan insani.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada pendapat beberapa ahli mengenai pengertian hubungan human relation ini. Menurut Wursanto [1987] human relation adalah;

Istilah hubungan kemanusiaan sering disebut juga hubungan antara manusia, memandang manusia dalam bentuk wujudnya saja atau secara lahirnya saja, sebaliknya dalam hubungan kemanusiaan yakni memandang manusia bukan saja dari wujudnya saja, tetapi dari segi sifatnya, wataknya, sikapnya, tingkahlakunya, kepribadiannya, dan berbagai aspek kejiwaan lainnya yang ada pada diri manusia. Dengan demikian titik berat pada hubungan kemanusiaan yaitu dari segi manusianya.

Jadi istilah human relation adalah terjemahan kata hubungan kemanusiaan yang bersifat rohaniah dengan memperhatikan aspek-aspek kejiwaan yang ada didiri manusia misalnya; watak, sikap, tingkahlaku, peramai, dan lain-lain aspek kejiwaan yang terdapat dalam diri manusia. Menurut Zinun [1984] mengatakan bahwa;

Human relation sebagai suatu lapangan dari kegiatan manajemen, lebih merupakan proses pengintegrasian manusia pada alam suatu situasi kerja sehingga mereka dapat didorong untuk bekerja sama secara produksi kerja sehingga mereka dapat didorong untuk bekerja sama secara produktif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, human relation adalah penyatuan manusia dalam hal ini, penyatuan kedalam situasi kerja sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan menurut The Liang Gie [1978] mengemukakan bahwa human relation adalah adanya suatu interaksi bukan sekedar relasi atau hubungan yang pasif melainkan suatu aktivitas yang merupakan "action oriented" untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan.

Pengertian diatas menekankan pada proses hubungan kerja sama antara orang-orang yang ada didalamnya atau orientasi kegiatan yang dilakukan bersama-sama dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Jadi human relation menyangkut persoalan mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya. Menurut Effendy [1993], human relation yaitu;

- a. Dalam arti luas, human relation adalah komunikasi persuasive yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati kedua belah pihak.
- b. Dalam arti sempit, human relation adalah komunikasi persuasive yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam situasi kerja [work situation] dan dalam organisasi kekerjaan [work organization] dengan tujuan untuk menggugah kegairahan bekerja dengan semangat bekerja sama yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati.

Jadi human relation dalam arti luas merupakan komunikasi yang dilakukan di mana saja, baik di rumah, di jalan, di pasar dan dalam berbagai kesempatan, sedangkan dalam arti sempit, di maksudkan sebagai komunikasi yang dilakukan dalam situasi formal. Dengan demikian, dalam human relation, aspek komunikasi sangat di perlukan agar human relation yang berlangsung betul-betul memiliki dampak yang bersifat positif terdapat kelancaran kerja karyawan.

Dari berbagai pengertian dan pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya human relation keseluruhan hubungan [interaksi] yang dilakukan yang bersifat rohaniah yang terjadi antara orang yang terlibat dalam organisasi dalam rangka penyelesaian tugas dan tanggung jawab dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang di miliki setiap individu, sehingga tujuan organisasi organisasi yang telah di tetapkan dapat terwujud.

11. Komunikasi

Teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk suatu perkara yang hendak dilaksanakan dalam proses komunikasi teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. Terdapat dua aspek utama yang dilihat secara tidak langsung dalam bidang ini sebagai satu bidang pengkajian yang baru. Aspek pertama ialah perkembangan dari beberapa sudut atau kejadian seperti teknologi komunikasi, perindustrian dan politik. Teknologi komunikasi contohnya radio, televisi, telefon, setelit, rangkaian komputer telah menghasilkan ide untuk mengetahui apakah kesan perkembangan teknologi komunikasi terhadap individu, masyarakat dan penduduk di sebuah negara. Perkembangan teknologi dunia, memperlihatkan bagaimana kesan politik

terhadap publik sehingga menimbulkan propaganda dan pendapat umum. Seterusnya perkembangan perindustrian seperti perminyakan dan perkapalan menuntut betapa perlunya komunikasi yang berkesan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas agar mencapai maksud atau tujuan organisasi tersebut. Aspek kedua ialah dari sudut kajian di mana para pelajar berminat untuk mengkaji bidang-bidang yang berkaitan dengan komunikasi seperti mereka yang dari bidang psikologi sosial mengkaji penggunaan teknologi baru terhadap kesan tayangan animasi kepada anak-anak, propaganda dan dinamik kelompok. Penjelasan atas politik dunia seperti menganalisa propaganda Nazi yang mampu mempengaruhi pendengar sehingga mereka patuh dan bersatu. Selanjutnya kajian awal penyelidik atas perindustrian yang pada peparuh abad ke-20 tertuju kepada memenuhi keinginan sektor pemasaran untuk mengetahui komunikasi dengan lebih dekat setelah pengiklanan menunjukkan kepentingannya. Oleh karena itu, bidang komunikasi mengambil langkah dan maju kedepan setelah berlakunya pengembangan dari sudut teknologi komunikasi, perindustrian dan politik dunia serta kajian-kajian yang telah.

Menurut asal katanya (*etimologi*) istilah Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu *communis* yang berarti sama. *Communis* berubah menjadi kata kerja *kommunicare* yang berarti menyebarkan / memberitahukan informasi kepada pihak lain guna mendapatkan pengertian yang sama.

Menurut Wilbur Schram, menyatakan bahwa “komunikasi berusaha mengadakan persamaan dengan orang lain.

Komunikasi menurut Wilbur Schramm (Effendy,1992:37), agar proses penyampaian pesan dapat berjalan secara efektif, maka komunikator harus memperhatikan kondisi-kondisi (*the condition of success in communication*), berikut ini :

1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga dapat menarik perhatian komunikan.
2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikannya sehingga sama-sama mengerti.
3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut.
4. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi situasi kelompok di mana komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki.

Berlo (1960:188) dalam bukunya *Communication Proses* mengemukakan komunikasi sebagai “susunan yang penuh keberhasilan jika penerima pesan memiliki makna yang sama dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber atau komunikator.

12. Konsep Komunikasi Pemerintahan

Proses penyampaian berbagai kebijakan, dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menuntun kehidupan bersama mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya dunia dan akhirat

Guna memberikan perlindungan, mensejahterakan, menceerdaskan dan ikut melaksanakan ketertiban dalam dan luar negeri dengan tidak merugikan pihak manapun secara illegal (Erliana hs, 2010)

Menurut Eliana Hasan, komunikasi merupakan proses penyampaian isi pikiran dan perasaan kpd diri sendiri dan orang lain.

Komunikasi Pemerintahan diartikan dalam beberapa bagian oleh (Robbins, 1996 : 5 dalam Erliana Hasan Komunikasi Pemerintahan)

1. Pengawasan
2. Motivasi
3. Pengungkapan emosional
4. Informasi

Komunikasi pemerintah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah guna mencapai tujuan negara dan pemerintahan sebagaimana yang diamanahkan oleh UUD 1945. berkaitan dengan komunikasi pemerintahan Koontz, et.al. (1996:169-170) mengemukakan bahwa komunikasi penting artinya karena komunikasi diperlukan untuk :

1. Menetapkan dan menyebarluaskan tujuan organisasi
2. Menyusun rencana untuk mencapai tujuan
3. Mengorganisasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan cara paling efektif dan efisien
4. Menyeleksi mengembangkan dan menilai anggota organisasi
5. Memimpin mengarahkan dan memotivasi serta menciptakan iklim yang menimbulkan orang untuk memberikan kontribusi Mengendalikan prestasi

13. Konsep kecamatan

Dalam Pasal 221 ayat 1 pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikatakan Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Selanjutnya pasal 224 ayat 1 menegaskan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut :

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Th.2014 sebagai berikut :

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Pada Pasal 224 UU No.23 Tahun 2014 ayat 1 Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Selanjutnya Tugas Camat diatur pada Pasal 225 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

B. Kerangka Pikir

Gambar. 2.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.



Sumber : Modifikasi Dari Sejumlah Dasar Teoritis.

D. Konsep Operasional

Untuk memperjelas konsep teoritis yang telah dicantumkan dan memperjelas pengertian, maka penulis mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan ini. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikator yakni sebagai berikut:

1. Kecamatan Kunto Darussalam adalah pembagian wilayah administratif dibawah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Camat merupakan pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinasi penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kecamatan.
3. Koordinasi adalah suatu usaha penyelarasan dari bagian atau unit-unit yang satu dengan yang lainnya dalam berbagai kegiatan sebagai usaha mencapai tujuan organisasi.
4. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, dan martabatnya.

5. Informasi adalah sesuatu yang dapat menambah pengetahuan penerimanya dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi.
6. Singkronisasi adalah suatu usaha untuk menyamakan persepsi atau pendapat antara anggota organisasi.
7. Partisipasi merupakan peran serta seseorang dalam proses pembangunan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian modal dan atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.
8. Human Relations merupakan segala bentuk hubungan baik formal maupun nonformal yang dijalankan oleh pimpinan terhadap bawahan, oleh bawahan terhadap sesama bawahan dalam usaha untuk memupuk kerjasama yang intim dan selaras guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9. Komunikasi adalah informasi atau pesan melalui saluran-saluran yang disusun daripada orang-orang yang bertindak sebagai pusat komunikasi.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan konsep yang penulis tetapkan sebagai penilaian dalam penelitian ini yang berdasarkan teori yang telah penulis paparkan pada studi kepustakaan, operasionalisasi variabel dalam penelitian ini

disajikan dalam bentuk tabel, yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Maka operasional variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

| Konsep | Variabel | Indikator | Item Penelitian | Skala |
|--|------------|--|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengerakkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Terry (dalam Hasibuan, 2006: 85) | Koordinasi | 1. Informasi | a. Memberikan keterangan b. Memberikan petunjuk | Ordinal |
| | | 2. Sinkronisasi | a. Memberikan tanggapan b. Memberikan pengetahuan | Ordinal |
| | | 3. Mendorong penerima untuk bertukar pikiran | a. Memberikan ide b. Memberikan evaluasi | Ordinal |
| | | 4. Partisipasi | a. Ikut dalam perencanaan b. Ikut serta dalam kegiatan | Ordinal |
| | | 5. Human Relations | a. Melakukan interaksi b. Membangun hubungan baik | Ordinal |
| | | 6. Komunikasi | a. Komunikasi lisan b. Komunikasi tertulis | Ordinal |

Sumber : Modifikasi Penelitian 2017

F. Teknik Pengukuran

Dalam menjawab tujuan penelitian tentang pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Maka dioperasionalkan konsep dan pengukuran dari indikator yang digunakan. pengukuran terhadap pelayanan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu Baik, Cukup Baik, dan Tidak Baik.

Variabel koordinasi, dengan indikator informasi, Sinkronisasi, Bertukar Pikiran, Partisipasi, Human relations dan Komunikasi. Dengan demikian kategori penilaian responden terhadap koordinasi dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

Baik : Apabila pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup baik : Apabila pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan berada pada kategori berada pada kategori 34%-66%.

Tidak baik : Apabila pelaksanaan tugas camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

Kemudian untuk pengukuran masing-masing indikator pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Informasi, dikategorikan:

Baik : Apabila informasi mengenai memberikan keterangan dan memberikan petunjuk yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 66\%$.

Cukup Baik : Apabila informasi mengenai memberikan keterangan dan memberikan petunjuk yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila informasi mengenai memberikan keterangan dan memberikan petunjuk yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

2. Sinkronisasi, dikategorikan:

Baik : Apabila sinkronisasi mengenai memberikan pengetahuan dan memberikan pendapat yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila sinkronisasi mengenai memberikan pengetahuan dan memberikan pendapat yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila sinkronisasi mengenai memberikan pengetahuan dan memberikan pendapat yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

3. Bertukar pikiran, dikategorikan:

Baik : Apabila bertukar pikiran yang dilakukan mengenai memberikan ide dan saran-saran yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila bertukar pikiran yang dilakukan mengenai memberikan ide dan saran-saran yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Tidak baik : Apabila bertukar pikiran yang dilakukan mengenai memberikan ide dan saran-saran yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

4. Partisipasi, dikategorikan:

Baik : Apabila partisipasi mengenai ikut serta dalam rencana kegiatan dan ikut serta dalam kegiatan yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila partisipasi mengenai ikut serta dalam rencana kegiatan dan ikut serta dalam kegiatan yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila partisipasi mengenai ikut serta dalam rencana kegiatan dan ikut serta dalam kegiatan yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

5. Human relations, dikategorikan:

Baik : Apabila human relations mengenai interaksi dan membangun hubungan baik yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila human relations mengenai interaksi dan membangun hubungan baik yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila human relations mengenai interaksi dan membangun hubungan baik yang ditetapkan pada berada kategori $\leq 33\%$.

6. Komunikasi, dikategorikan:

Baik : Apabila komunikasi mengenai komunikasi langsung dan komunikasi tertulis yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup baik : Apabila komunikasi mengenai komunikasi langsung dan komunikasi tertulis yang ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila komunikasi mengenai komunikasi langsung dan komunikasi tertulis yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.